EVALUASI TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO STUDI KASUS TRAYEK TONGGAS-LUMBANG DAN PAJARAKAN-TIRIS

EVALUATION OF RURAL TRANSPORTATION TARIFFS IN PROBOLINGGO REGENCY ROUTE CASE STUDY TONGGAS-LUMBANG DAN PAJARAKAN-TIRIS

JULIA ABELITA[1)],SUDIRMAN ANGGADA[2)]. SUGITA[3)].

[1] Taruna D III Manajemen Transportasi Jalan, Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD Bekasi, Jl. Raya Setu No.89, Cibuntu, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat 17520 Indonesia

[2] Dosen PTDI – STTD, Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD Bekasi, Jl. Raya Setu No. 89, Cibuntu, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat 17520, Indonesia

[3] Dosen PTDI – STTD, Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD Bekasi, Jl. Raya Setu No. 89, Cibuntu, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat 17520, Indonesia

Juliaabelita1107@gmail.com

ABSTRACT

Transportation plays an important role in the development of a Regency or City. The economic growth of a region is always related to community activities that will form a movement pattern that will encourage community mobility. Passenger fares for transporting people on these routes consist of economy class fares and non-economy class fares. In the implementation of rural transportation operations in Probolinggo Regency, it is necessary to set tariffs for service users. The Probolinggo Regency Government has set the tariff based on the Decree of the Regent of Probilinggo Regency Number 06 of 2009. The current tariff in Probolinggo Regency is the tariff set by the operator. This creates a conflict with service users because the Decision only benefits one party and has an impact on the interests of the community to use rural transportation.

The purpose of this study is to analyze the existing fare from the operator's point of view and find out the ideal fare amount from the passenger's point of view.

The analysis of this study uses a calculation method based on Vehicle Operating Costs, Ability to Pay and Willingness to Pay. Then calculations are carried out so as to get ideological tariff recommendations in terms of operators and passengers in accordance with existing conditions.

Keywords: *Rural Transportation, Tariffs, BOK, ATP, WTP*

ABSTRAK

Transportasi memegang peranan penting dalam pembangunan suatu Kabupaten atau Kota. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah selalu berkaitan dengan aktivitas masyarakat yang akan membentuk pola pergerakan yang akan mendorong mobilitas masyarakat. Tarif penumpang untuk mengangkut orang pada rute tersebut terdiri dari tarif kelas ekonomi dan tarif kelas non-ekonomi. Dalam pelaksanaan operasional angkutan pedesaan di Kabupaten Probolinggo, perlu ditetapkan tarif bagi pengguna jasa. Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah menetapkan tarif berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Probilinggo Nomor 06 Tahun 2009. Tarif yang berlaku saat ini di Kabupaten Probolinggo adalah tarif yang ditetapkan oleh operator. Hal ini menimbulkan konflik dengan pengguna jasa karena Keputusan tersebut hanya menguntungkan satu pihak dan berdampak pada kepentingan masyarakat untuk menggunakan transportasi pedesaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tarif yang ada dari sudut pandang operator dan mengetahui besaran tarif ideal dari sudut pandang penumpang.

Analisis penelitian ini menggunakan metode perhitungan berdasarkan Biaya Operasi Kendaraan, Kemampuan Membayar dan Kesediaan Membayar. Kemudian dilakukan perhitungan sehingga mendapatkan rekomendasi tarif ideologis dari segi operator dan penumpang sesuai dengan kondisi yang ada.

Kata kunci: Transportasi Pedesaan, Tarif, BOK, ATP, WTP

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan salah satu bagian yang terpenting untuk perkembangan suatu wilayah kabupaten atau kota. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah selalu berkaitan dengan aktivitas Masyarakat yang akan membentuk suatu pola pergerakan yang akan mendorong mobilitas Masyarakat. Besarnya tingkat perpindahan tersebut harus di tunjang oleh sarana dan prasarana transportasi yang baik dan memadai. Pemegang peranan penting untuk mendukung mobilitas Masyarakat yaitu pelayanan jasa angkutan umum. Dengan tersedianya angkutan umum dapat mempermudah Masyarakat untuk melakukan perpindahan atau perjalanan ditambah lagi dengan pelayanan yang baik.

Angkutan pedesaan merupakan angkutan yang melayani dari satu tempat ketempat lainnya dalam suatu daerah kabupaten dan tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan (UU No 22 Tahun 2019). Tarif adalah besaran biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan angkutan penumpang umum yang dinyatakan dalam rupiah. Penetapan tarif dimasukkan untuk mendorong terciptanya pengguna prasarana dan sarana pengangkutan secara optimum dengan mempertimbangkan lintasan yang bersangkutan (Departemen Perhubungan, 2002). Penentuan Tarif angkutan pedesaan di Kabupaten Probolinggo ditentukan sepihak. Penentuan tarif tersebut tanpa mempertimbangkan dari segi penumpang yang dimana tarif yang ditentukan dari segi operator sebesar Rp. 12.000 pada taryek Tonggas-Lumbang dan Rp. 15.000 pada trayek Pajarakan-Tiris.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi tarif angkutan pedesaan di Kabupaten Probolinggo, berdasarkan biaya operasional kendaraan, ATP dan WTP. Untuk mengetahui tarif yang relevan untuk angkutan pedesaan taryek Tonggas-Lumbang dan Pajarakan-Tiris.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini Angkutan Pedesaan Trayek Tonggas – Lumbang dan Pajarakan – Tiris di Kabupaten Probolinggo.

Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Jenis data primer berupda: data harga komponen BOK, Data ATP dan WTP penumpang trayek Tonggas – lumbang dan Pajarakan – Tiris. Data sekunder berupa SK Tarif Angkutan Umum Kab. Probolinggo 2009, Data Pendapatan perkapita Tahun 2023, SK trayek angkutan umum Kab.Probolinggo dan data hasil Laporan Umum TIM PKL Kabupaten Probolinggo.

Teknik Analisis Data

Tahapan Teknik analisis yang dilakukan dalam evaluasi tarif angkutan pedesaan di Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Melakukan analisis biaya operasional kendaraan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: SK.687/AJ.206/BLJD/2002. Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap Dan Teratur, analisis ini meliputi analisis biaya langsung dan biaya tidak langsung. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui berapa besarnya tarif yang seharusnya dibayarkan oleh penumpang angkutan umum pada wilayah studi berdasarkan dari biaya yang dikeluarkan operator.

2. Analisis Tarif berdasarkan WTP dan ATP
   Menganalisis tarif sesuai dengan kemauan membayar Masyarakat (WTP) dan kemampuan membayar Masyarakat (ATP). Selanjutnya dilakukan perhitungan tarif WTP dan ATP, untuk WTP berdasarkan wawancara dengan pengguna angkutan pedesaan dan ATP berdasarkan pendapatan PDRB Kabupaten Probolinggo dalam angka 2024. Pada analisis WTP ini responden diberikan beberapa pilihan untuk membayar angkutan yang dirasa mereka cocok dan pertanyaan kesedian penambahan tarif untuk peningkatan SPM. Untuk analisis ATP menggunakan metode pendekatan pendapatan PDRB Kabupaten Probolinggo. Pada perhitungan tersebut mempertimbangkan pendapatan, presentase transportasi yang dikeluarkan dan frekuensi penggunaan angkutan umum
3. Hasil Analisis
   Hasil dari analisis akan dibandingkan dengan tarif eksisting yang berlaku diwilayah studi, jika terdapat perbedaan maka dilakukan penentuan tarif ideal berdasarkan perhitungan BOK, dan perhitungan ATP dan WTP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan

1) Trayek Tonggas – Lumbang

a. Karakteristik Kendaraan

1)	Trayek	: Tonggas-Lumbang
2)	Tipe Kendaraan	: Mobil Penumpang
3)	Jenis Pelayanan	: Angkutan Pedesaan
4)	Kapasitas Kendaraan	: 12 seat
5)	Jenis BBM	: Pertalite

b. Produksi Kendaraan

1)	Km Tempuh per trip	: 15 Km
2)	Frekuensi per hari	: 2 rit
3)	Km tempuh Per hari	: 60 Km
4)	Km kosong	: 1,8 Km
5)	Hari Operasi per bulan	: 30 hari.
6)	Hari operasi per tahun	: 360 hari
7)	Km tempuh per bulan	: 1800 Km
8)	Km tempuh per tahun	: 21.600 Km
9)	Seat.km per trip	: 180 seat.km
10)	Seat.km per hari	: 720 seat.km
11)	Seat.km per bulan	: 21.600 seat.km
12)	Seat.km per tahun	: 259.200 seat.km

2) Trayek Pajarakan – Tiris

a. Karakteristik Kendaraan

1)	Trayek	: Pajarakan - Tiris
2)	Tipe Kendaraan	: Mobil Penumpang Umum
3)	Jenis Pelayanan	: Angkutan Pedesaan
4)	Kapasitas Kendaraan	: 12 Seat
5)	Jenis BBM	: Pertalite

b. Produksi Kendaraan

1)	Km Tempuh per trip	: 32 km
2)	Frekuensi per hari	: 2 rit
3)	Km Tempuh per hari	: 128 km

4) Km kosong : 3,8 km
5) Hari operasi per bulan : 30 hari
6) Hari operasi per tahun : 360 hari
7) Km tempuh per bulan : 3955,2 km
8) Km tempuh per tahun : 47.462 km
9) Seat.km per trip : 384 seat.km
10) Seat.km per hari : 1.582 seat.km
11) Seat.km per bulan : 47.462 seat.km
12) Seat.km per tahun : 569.549 seat.km

2. Rekapitulasi Biaya Operasional Kendaraan

Tabel 1. Rekapitulasi Biaya Operasional Kendaraan

BOK (Rp per Ken-Km)	Trayek Tonggas-Lumbang	Trayek Pajarakan-Tiris
Biaya Langsung		
A. Penyusutan	1.078,75	505,66
B. Gaji dan tunjangan awak angdes	809,06	379,25
C. BBM	833,33	555,56
D. Ban	80	80
E. Service Kecil	80	80
F. Service Besar	61,25	61,25
G. over Houl Mesin	32,11	21,07
H. STNK/pajak Kendaraan	12,94	6,07
I.Suku Cadang dan Body	67,42	0,03
J. Retribusi Terminal	33,33	15,63
K. Cuci Bus	60	55,8
L. Asuransi	101,13	47,41
Jumlah	3.249,33	1.807,72
Biaya Tidak Langsung		
A. Biaya Pengelolaan	2,7	1,26
Biaya Pokok Per Kendaraan-Km		
A. Biaya Langsung	3.158,30	1.765,06
B. Biaya Tidak Langsung	2,7	1,26
Jumlah	3.252,03	1.808,98

Sumber : Hasil Analisis

3. Perhitungan Tarif

Setelah dilakukan perhitungan terhadap Biaya Operasional Kendaraan, data BOK/kend-km dari setiap trayek digunakan untuk menghitung nilai tarif pokok/pnp-km, sebagai berikut :
Contoh Perhitungan Trayek Tonggas – Lumbang

$$Tarif\ Pokok = \frac{Total\ biaya\ pokok}{faktor\ pengisisan\ \times kapasitas\ kendaraan}$$

$$Tarif\ Pokok = \frac{3.252{,}03}{29\%\ \times 12}$$
$$Tarif\ Pokok = 934{,}49\ per\ km$$

$$Tarif\ BEP = Tarif\ pokok\ per\ pnp - km\ \times Jarak\ Rata - rata$$
$$Tarif\ BEP = 934{,}49\ \times 15$$
$$Tarif\ BEP = 14.017{,}37/pnp$$

$$Tarif = (BEP) + (10\% \times BEP)$$
$$Tarif = (14.017{,}37) + (10\% \times 14.017{,}37)$$
$$Tarif = Rp.15.419/pnp$$

Berikut rekapitulasi perhitungan tarif dari sisi operator untuk trayek yang di kaji:

Tabel 2. Rekapitulasi Tarif dari sisi Operator

Trayek	Panjang Trayek (km)	Tarif Pokok/PNP-km	Tarif BEP	Tarif Dari Sisi Operator
Tonggas-Lumbang	15	Rp. 934,49	Rp. 14.017,37	Rp. 15.419
Pajarakan-Tiris	32	Rp. 386,54	Rp. 12.369,12	Rp. 13.606

Sumber : Hasil Analisis

4. Perhitungan ATP

Untuk melakukan perhitungan tarif berdasarkan ATP diperlukan perhitungan biaya perjalanan yang dapat diterima untuk satu kali perjalanan. Hal ini disebabkan karena terdapat batas kewajaran kemampuan orang mengeluarkan biaya perjalanan dari pendapatannya.

Berdasarkan data dari PDRB Kabupaten Probolinggo Pendapatan per tahun 2023 sebesar Rp. 42.376.920.000.000 dengan pendapatan perkapita perbulannya sebesar Rp. 3.531.410.000.000. Idealnya pendapatan untuk kebutuhan transportasi sebesar 10%.

Tabel 3. Analisis Perhitungan ATP Kabupaten Probolinggo

Pendapatan PDRB Tahun 2023	Pendapatan Perkapita/Bulan	Persentase Pendapatan Untuk Transportasi /Bulan	Jumlah Penduduk Kabupaten Probolinggo 2024	Nilai ATP
Rp. 42.376.920.000.000,00	Rp. 3.531.410.000.000,00	10%	1.163.859,00	Rp. 10.114,08

Sumber : Hasil Analisis

5. Perhitungan WTP

Untuk perhitungan WTP, diperlukan data dari hasil wawancara penumpang angkutan pedesaan pada trayek di wilayah studi. Adapun pertanyaan yang ditanyakan ialah berapa tarif yang diharapkan penumpang untuk menggunakan jasa angkutan umum.

Tabel 4. Rata-rata Tarif WTP Trayek Tonggas – Lumbang

Kelas Tarif		Nilai Tengah	Frekuensi	Komulatif		FX Median
Interval				Frekuensi	Persentase	
Rp. 5000	Rp. 5.503	Rp. 5.251	7	7	22%	Rp. 36.760
Rp. 5.503	Rp. 6.006	Rp. 5.754	19	26	81%	Rp.109.329
Rp. 6.006	Rp. 6.508	Rp. 6.257	0	26	81%	0

Rp. 6.508	Rp. 7.011	Rp. 6.760	5	31	97%	Rp. 33.798
Rp. 7. 011	Rp. 7.514	Rp. 7.262	0	31	97%	0
Rp. 7.514	Rp. 8. 017	Rp. 7.765	1	32	100%	Rp. 7.765
TOTAL			32		Rp. 187.652	

Berdasarkan data dari tabel diatas dilakukan perhitungan WTP rata-rata. Berikut ini merupakan perhitungan untuk WTP rata-rata trayek Tonggas-Lumbang :

$$Rata - rata\ WTP = \frac{\sum Xi.Fi}{N} = \frac{Rp.187.652}{32} = 5.864$$

Dari perhitungan rata-rata WTP trayek Tonggas-Lumbang didapatkan sebesar Rp. 5.864 Perhitungan tersebut didapatkan dari perhitungan total fx median di bagi total frekuensi.

Tabel 5. Rata-rata Tarif WTP Trayek Pajarakan – Tiris

Kelas Tarif Interval		Nilai Tengah	Frekuensi	Komulatif		FX Median
				Frekuensi	Persentase	
Rp. 7.000	Rp. 7.438	Rp. 7.219	10	10	17%	Rp. 72.192
Rp. 7.438	Rp. 7.877	Rp. 7.658	0	10	17%	0
Rp. 7.877	Rp. 8.315	Rp. 8.096	8	18	31%	Rp. 64.767
Rp. 8.315	Rp. 8.753	Rp. 8.534	0	18	31%	0
Rp. 8.753	Rp. 9.192	Rp. 8.973	24	42	71%	Rp.215.342
Rp. 9.192	Rp. 9.630	Rp. 9.849	0	42	71%	0
Rp. 9.630	Rp. 10.068	Rp. 9.849	17	59	100%	Rp.167.438
TOTAL			59		Rp. 519.739	

Sumber : Hasil Analisis

Berdasarkan data dari tabel diatas dilakukan perhitungan WTP rata-rata. Berikut ini merupakan perhitungan untuk WTP rata-rata trayek Pajarakan-Tiris :

$$Rata - rata\ WTP = \frac{\sum Xi.Fi}{N} = \frac{Rp.519.739}{59} = 8.809$$

Dari perhitungan rata-rata WTP trayek Pajarakn-Tiris didapatkan sebesar Rp. 8.809 Perhitungan tersebut didapatkan dari perhitungan total fx median di bagi total frekuensi.

Tabel 6. Reakpitulasi Analisis Tarif

Trayek	Panjang Trayek (KM)	Tarif Operator	ATP	WTP
Tonggas-Lumbang	15	Rp 15.419	Rp 10.114,08	Rp 5.864
Pajarakan-Tiris	32	Rp 13.606	Rp 10.114,08	Rp 8.809

Sumber : Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat diketahui tarif pada trayek Tonggas-Lumbang dan Pajarakan Tiris berdasarkan Load Factor eksisting. Tetapi pada kedua trayek tersebut tarif yang diperoleh melebihi nilai ATP Masyarakat Kabupaten Probolinggo Rp. 10.114.

6. Hubungan ATP dan WTP

1. Trayek Tonggas – Lumbang

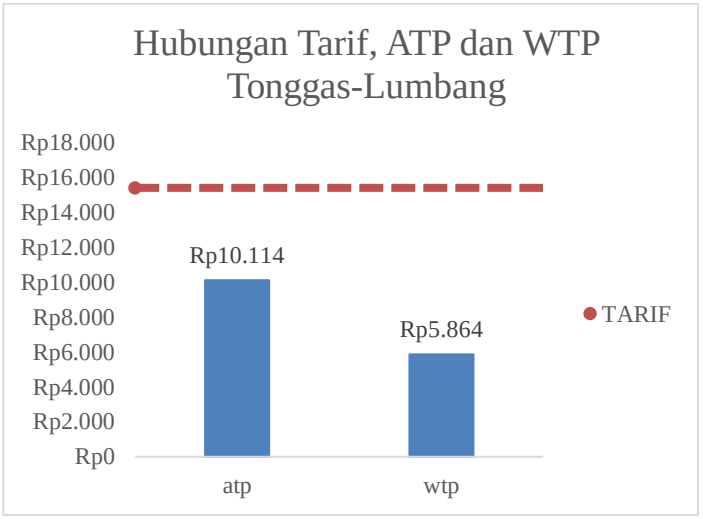

Dapat dilihat pada diagram diatas merupakan Tarif, ATP dan WTP pada trayek Tonggas-Lumbang pada garis Tarif berada di atas ATP *(abillitiy To Pay)* dan WTP *(Willingnes To Pay).* Hal tersebut dapat diartikan penentuan tarif harus mempertimbangkan kemampuan dan kemauan Masyarakat. Selisih antara tarif dengan ATP itu harus menjadi pertimbangan dalam menentukan subsidi. Dengan melihat BOK dari trayek Tonggas-Lumbang sebesar Rp.15.419, maka diperlukan subsidi sebesar Rp. 5.305

2. Trayek Pajarakan – Tiris

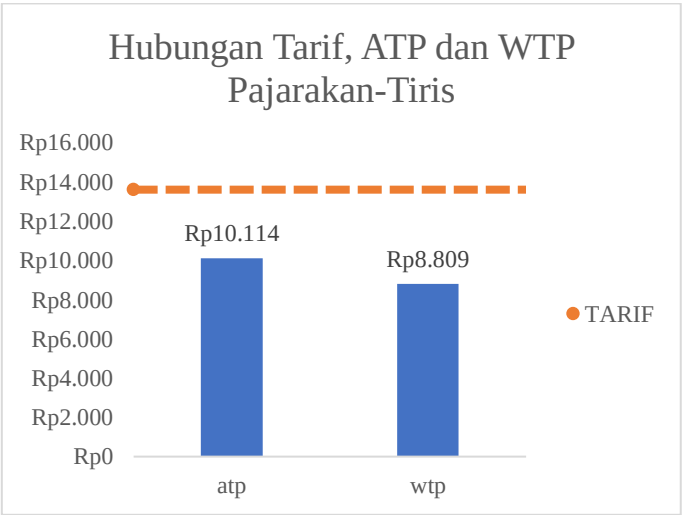

Dapat dilihat pada diagram diatas merupakan Tarif, ATP dan WTP pada trayek Pajarakan-Tiris pada garis Tarif berada di atas ATP *(abillitiy To Pay)* dan WTP *(Willingnes To Pay).* Hal tersebut dapat diartikan penentuan tarif harus

mempertimbangkan kemampuan dan kemauan Masyarakat. Selisih antara tarif dengan ATP itu harus menjadi pertimbangan dalam menentukan subsidi. Dengan melihat BOK dari trayek Tonggas-Lumbang sebesar Rp.13.606, maka diperlukan subsidi sebesar Rp. 3.492.

7. Hasil Analisis Data

Berikut ini merupakan hasil perhitungan tarif dari sisi operator, sisi pengguna dan sisi regulator :

Tabel 7. Hasil Analisis

Trayek	Sisi Operator	ATP	WTP	Subsisdi	Tarif Eksisting
Tonggas-Lumbang	Rp. 15.419	Rp. 10.114	Rp. 5.864	Rp. 5.305	Rp. 12.000
Pajarakan-Tiris	Rp. 13.606	Rp. 10.114	Rp. 8.809	Rp. 3.492	Rp. 15.000

Sumber : Hasil Analisis

Berdasarkan rekap analisis yang telah dilakukan dapat diketahui perbandingan tarif angkutan berdasarkan BOK, ATP dan WTP. Pada trayek tonggas – Lumbang tarif yang berlaku saat ini yaitu Rp. 12.000 maka pihak pengusaha jasa angkutan umum seharusnya menaikan tarif menjadi sebesar Rp. 15.419 dengan kenaikan sebesar Rp. 3.419. sedangkan di trayek Pajarakan-Tiris tarif BOK lebih rendah dibandingkan dengan tarif eksisting.

Tarif Abillitiy To Pay saat ini pada trayek Tonggas-Lumbang adalah Rp. 10.114 dimana tarif ini di nilai lebih rendah dari tarif BOK dengan selisih Rp. 5.305 sehingga diperlukannya subsidi terhadap tarif BOK sehingga penumpang mau menaiki angkutan umum dan pihak Perusahaan angkutan umum tidak mengalami kerugian dengan pemberian subsidi. selanjutnya pada trayek Pajarakan-Tiris dimana tarif ATP sebesar Rp. 10.114 dan dimana tarif ini dinilai lebih rendah dibandingkan dari tarif BOK dengan selisih Rp. 3.492 sehingga diperlukannya pemberian subsidi kepada perushaan angkutan agar Perusahaan angkutan tidak mengalami kerugian dengan pemberian subsidi.

8. Skema Penggurangan Subsidi

1. Pemberian Tarif Subsidi 75%

   Subsidi 75% ini yaitu dengan memberikan pada angkutan umum dan 25% nya ditanggung oleh Masyarakat. Sehingga pemerintah membayarkan 75% dari tarif eksisting. Untuk menghitung besaraan subsidi ini pemerintah melakukan subsidi sebesar 75% dari tarif, berikut merupakan perbandingan tarif berdasarkan hasil analisis:

Tabel 8. Kondisi Tarif saat Subsidi 75%

Trayek	Tarif	Penumpang	Subsidi	Biaya di Tanggung Masyarakat	Tarif penumpang
Tonggas-lumbang	Rp.15.419	32	Rp.493.408	Rp.123.352	Rp.3.854,75
Pajarakan-Tiris	Rp. 13.606	59	Rp.802.754	Rp.200.688	Rp.3.401,50

Sumber : Hasil Analisis

Total Subsidi yang di bayarkan Pemerintah selama satu hari jika subsidi 75% yaitu Rp.972.121,50 dan jika satu tahun totalnya yaitu Rp.354.824.347,50 tarif yang di bebankan ke Masyarakat adalah Trayek Tonggas-Lumbang sebesar Rp. 3.854,75, Trayek Pajarakan-Tiris Rp. 3.401,50.

2. Pemberian Tarif Subsidi 50%
   Subsidi 50% ini yaitu dengan memberikan pada angkutan umum dan 50% nya ditanggung oleh Masyarakat. Sehingga pemerintah membayarkan 50% dari tarif eksisting. Untuk menghitung besaraan subsidi ini pemerintah melakukan subsidi sebesar 50% dari tarif, berikut merupakan perbandingan tarif berdasarkan hasil analisis:

Tabel 9. Kondisi Tarif saat Subsidi 50%

Trayek	Tarif	Penumpang	Subsidi	Biaya di Tanggung Masyarakat	Tarif penumpang
Tonggas-lumbang	Rp.15.419	32	Rp.493.408	Rp.246.704	Rp.7.709,50
Pajarakan-Tiris	Rp. 13.606	59	Rp.802.754	Rp401.377	Rp.6.803,00

Sumber : Hasil Analisis

Total Subsidi yang di bayarkan Pemerintah selama satu hari jika subsidi 50% yaitu Rp.648.081,00 dan jika satu tahun totalnya yaitu Rp.236.549.565,00 tarif yang di bebankan ke Masyarakat adalah Trayek Tonggas-Lumbang sebesar Rp. 7.709,50, Trayek Pajarakan-Tiris Rp. 6.803,00.

3. Pemberian Tarif Subsidi 25%
   Subsidi 25% ini yaitu dengan memberikan pada angkutan umum dan 75% nya ditanggung oleh Masyarakat. Sehingga pemerintah membayarkan 25% dari tarif eksisting. Untuk menghitung besaraan subsidi ini pemerintah melakukan subsidi sebesar 25% dari tarif, berikut merupakan perbandingan tarif berdasarkan hasil analisis:

Tabel 10. Kondisi Tarif saat Subsidi 25%

Trayek	Tarif	Penumpang	Subsidi	Biaya di Tanggung Masyarakat	Tarif penumpang
Tonggas-lumbang	Rp.15.419	32	Rp.493.408	Rp.370.056	Rp.11.564,25
Pajarakan-Tiris	Rp. 13.606	59	Rp.802.754	Rp602.065	Rp.10.204,50

Sumber : Hasil Analisis

Total Subsidi yang di bayarkan Pemerintah selama satu hari jika subsidi 25% yaitu Rp.324.040,50 dan jika satu tahun totalnya yaitu Rp.118.274.782,50 tarif yang di bebankan ke Masyarakat adalah Trayek Tonggas-Lumbang sebesar Rp. 11.564,25 Trayek Pajarakan-Tiris Rp. 10.204,50.

SIMPULAN

1. Dari analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa tarif yang sesuai jika dilihat dari sisi operator adalah sebagai berikut :
   a. Trayek Tonggas-Lumbang : Rp. 15.419

b. Trayek Pajarakan-Tiris : Rp. 13.606

2. Dari hasil analisis diketahui bahwa tarif yang sesuai dilihat dari sisi pengguna jasa berdasarkan perhitungan *Abillity To Pay* dan *Willingnes To Pay* adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan *Abillity to Pay* (Kemampuan Membayar)
   a) Trayek Tonggas-Lumbang : Rp. 10.114
   b) Trayek Pajarakan-Tiris : Rp. 10.114

b. Berdasarkan *Willingnes to Pay* (Kemauan Membayar)
   a) Trayek Tonggas-Lumbang : Rp. 5.864
   b) Trayek Pajarakan-Tiris : Rp. 8.809

3. Tarif Ideal yang disarankan penulis yaitu melihat dari segi operator berupa perhitungan BOK (Biaya Operasional Kendaraan) dan segi penumpang berupa ATP (Abillitiy To Pay) dan WTP (Willingnes To Pay). Dengan demikian tarif yang diusulkan pada kedua trayek adalah sebagai berikut :
   a) Trayek Tonggas-Lumbang adalah Rp. 10.114. Pada Trayek ini terdapat subsidi sebesar Rp. 5.305 untuk menutupi tarif dari segi operator.
   b) Trayek Pajarakan-Tiris adalah Rp. 10.114. Pada Trayek Ini terdapat Subsidi sebesar Rp. 3.492.

SARAN

1. Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk dapat mengontrol pelayanan angkutan pedesaan secara berkala sehingga dapat mengetahui apabila terjadi perbedaan antara tarif lapangan dengan tarif yang sesuai ketetapan pemerintah, dan mengambil kebijakan labih lanjut.
2. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelayanan angkutan kepada penumpang oleh pemerintah, diharapkan agar kualitas pelayanan angkutan umum akan mampu mengimbangi kemauan membayar (WTP) dari pengguna jasa angkutan.
3. Untuk dapat menangani permasalahan tarif yang sedang terjadi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat melakukan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan untuk dapat membahas terkait tarif yang saat ini berlaku dengan keanggotaan forum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 Pasal 21 ayat (1), yakni:
   a. Bupati/Walikota;
   b. Kepala Kepolisian resor/resort kota;
   c. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
   d. Asosiasi Perusahaan angkutan umum di Kabupaten/Kota;
   e. Perwakilan perguruan tinggi;
   f. Tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

   Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut salah satunya dengan melakukan forum lalu lintas dan angkutan jalan guna membahas tentang tarif yang sesuai untuk Angkutan Pedesaan di Kabupaten Problinggo dan sudah disepakati oleh pihak operator, regulator, dan user. Pelaksanaan penetapan tarif yang disepakati harus berdasarkan *good govermance* dimana pihak pemerintah yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi keinginan Masyarakat serta mampu mengambil Keputusan serta memecahkan masalah secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

_____, 2009, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,Jakarta: Kementerian Perhubungan.

_____, 2019. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

_____, 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tentang Angkutan Jalan.

_____, 2002. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 687 / AJ 206 / DRJD / 2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Umum di Wilayah Perkotaan dalam Trayek Tetap dan Teratur.

_____, 2009. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Kabupaten Probolinggo.

Arsyad, N., & Sufina, M. (2020). Evaluasi tarif Angkutan Umum (ANGKOT) Kota Pariaman Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan. *Rang Teknik Journal*, *3*(1), 83-88.

Firdausi, M., El Hafizah, N., Sekartadji, R., & Istiono, H. (2020). Analisis Kemampuan dan Kemauan Membayar (ATP–WTP) Penumpang Bus Kota Rute Purabaya-Bratang. *Jurnal Teknologi dan Manajemen*, *1*(1), 62-66.

Herman, H., & Tamara, R. (2020). Penetapan Tarif pada Reaktivasi Kereta Api Bandung–Ciwidey dengan Metode Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP). *RekaRacana: Jurnal Teknil Sipil*, *6*(1), 54.

Nashiroh, L., & Ratnaningsih, D. (2021). Analisa Biaya Operasional Kendaraan (Bok) Angkutan Umum Pedesaan Trayek Gadang–Karangkates Di Kabupaten Malang. *Jurnal Online Skripsi Manajemen Rekayasa Konstruksi (JOS-MRK)*, *2*(4), 242-245.

Sembiring, A. R. (2021). *Analisis Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan Willingness To Pay (WTP)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Yusuf, A., Ishak, I., & Putra, Y. (2022). Evaluasi Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (Studi Kasus Angkot Kud Trayek Bukittinggi-Sungai Pua). *Ensiklopedia Research and Community Service Review*, *2*(1), 40-48.

Yulianto, B., Mahmudah, A. M. H., & GRS, W. A. M. ANALISIS POTENSI DEMAND, ABILITY TO PAY (ATP) DAN WILLINGNESS TO PAY (WTP) BATIK SOLO TRANS (BST) KORIDOR 6 PADA SEKOLAH. *Matriks Teknik Sipil*, *11*(2), 226-233

Wahyuningsih, T. (2020). Kajian Tarif Angkutan Umum Bus Damri Rute BIL–Kota Matram Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan. *Jurnal Planoearth*, *5*(2), 111-114.